



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara maka pengalokasian jumlah dana yang diterima setiap desa dihitung dengan memperhatikan Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengalokasian Dana Desa yang diterima setiap desa perlu mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

## **Pasal 2**

Dana Desa untuk setiap Desa dibagi dengan cara:

- a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa dibagi secara merata kepada Desa.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa dengan rumus:

$$\mathbf{W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)}$$

Keterangan:

W = Dana Desa proporsional setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa dalam Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa dalam Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa dalam Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa dalam Daerah.

### **Pasal 3**

10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dibagi secara proporsional menggunakan variabel dan Rasio Bobot:

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Rasio Jumlah penduduk Desa;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Rasio jumlah penduduk miskin Desa;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk Rasio luas wilayah Desa;
- d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa.

### **Pasal 4**

Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

### **Pasal 6**

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui pada Bank Pemerintah.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APB Desa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Sebelumnya paling lambat bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya paling lambat bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya paling lambat bulan September.
- (7) Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

### **Pasal 8**

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi;

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

### **Pasal 9**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

### **Pasal 10**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

### **Pasal 11**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan/atau
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

### **Pasal 12**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

### **Pasal 13**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
  - 1. zirkon;
  - 2. kaolin;
  - 3. zeolit;
  - 4. bentonit;
  - 5. silika (pasir kuarsa);
  - 6. kalsit (batu kapur/gamping);
  - 7. felspar; dan
  - 8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
  - 1. onik;
  - 2. opal;
  - 3. giok;
  - 4. agat;
  - 5. topas;
  - 6. perlit;
  - 7. toseki;
  - 8. batu sabak;
  - 9. marmer;
  - 10. granit;
  - 11. kalsedon;
  - 12. rijang (*chert*);
  - 13. jasper;
  - 14. krisopras;
  - 15. garnet; dan
  - 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

### **Pasal 14**

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya
- (3) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 17**

- (1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati/walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 April 2015

**BUPATI BULUNGAN,**

Ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

Ttd.

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 05**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN DANA DESA**

**FORM LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa:**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER TAHAP I/II/III  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REKENING | URAIAN  | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI I (Rp.) | LEBIH/KURANG (Rp.) | KET. |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|------|
| 1             | 2   | 3                     |                          |                    | 4    |
| 1             | PENDAPATAN  |                       |                          |                    |      |
| 1 1           | <i>Pendapatan Asli Desa</i>                               |                       |                          |                    |      |
| 1 1 1         | Hasil Usaha   |                       |                          |                    |      |
| 1 1 2         | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong                    |                       |                          |                    |      |
| 1 1 3         | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah                   |                       |                          |                    |      |
|               |   |                       |                          |                    |      |
| 1 2           | <i>Pendapatan Transfer</i>                                |                       |                          |                    |      |
| 1 2 1         | Dana Desa   |                       |                          |                    |      |
| 1 2 2         | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota |                       |                          |                    |      |
| 1 2 3         | Alokasi Dana Desa   |                       |                          |                    |      |
| 1 2 4         | Bantuan Keuangan  |                       |                          |                    |      |
| 1 2 4 1       | Bantuan Provinsi  |                       |                          |                    |      |
| 1 2 4 2       | Bantuan Kabupaten / Kota                                  |                       |                          |                    |      |
|               |   |                       |                          |                    |      |
| 1 3           | <i>Pendapatan Lain lain</i>                               |                       |                          |                    |      |
| 1 3 1         | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat   |                       |                          |                    |      |
| 1 3 2         | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah                        |                       |                          |                    |      |
|               |   |                       |                          |                    |      |
|               | JUMLAH PENDAPATAN   |                       |                          |                    |      |
|               |   |                       |                          |                    |      |
| 2             | BELANJA   |                       |                          |                    |      |
| 2 1           | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>           |                       |                          |                    |      |
| 2 1 1         | Penghasilan Tetap dan Tunjangan                           |                       |                          |                    |      |
| 2 1 1 1       | Belanja Pegawai:  |                       |                          |                    |      |
|               | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat             |                       |                          |                    |      |
|               | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat                     |                       |                          |                    |      |
|               | - Tunjangan BPD   |                       |                          |                    |      |
| 2 1 2         | Operasional Perkantoran                                   |                       |                          |                    |      |
| 2 1 2 2       | Belanja Barang dan Jasa                                   |                       |                          |                    |      |
|               | - Alat Tulis Kantor                                       |                       |                          |                    |      |

|   |   |   |   |                                     |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|   |   |   |   | - Benda POS                         |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pakaian Dinas dan Atribut         |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pakaian Dinas                     |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Alat dan Bahan Kebersihan         |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Perjalanan Dinas                  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pemeliharaan                      |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Air, Listrik, dan Telepon         |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal                       |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Komputer                          |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Meja dan Kursi                    |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Mesin TIK                         |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 |   | Operasional BPD                     |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - ATK                               |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Penggandaan                       |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi Rapat                    |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                         |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 |   | Operasional RT/ RW                  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - ATK                               |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Penggadaan                        |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Komsumsi Rapat                    |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                         |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |   |   | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 |   | Perbaikan Saluran Irigasi           |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Upah Kerja                        |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal                       |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Semen                             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Material                          |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |   | Pengaspalan jalan desa              |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa :           |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Upah Kerja                        |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor                             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                          |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal:                      |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Aspal                             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Pasir                             |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst .....                         |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |   | Kegiatan.....                       |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |   |   | Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan               |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 1 |   | Kegiatan Pembinaan<br>Ketentraman dan Ketertiban |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                         |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor Pelatih                                  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Bahan Pelatihan                                |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 2 |   | Kegiatan.....                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 |   |   | Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat                |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1 |   | Kegiatan Pelatihan Kepala<br>Desa dan Perangkat  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                         |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor pelatih                                  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Bahan pelatihan                                |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 2 |   | Kegiatan.....                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |   |   | <i>Bidang Tak Terduga</i>                        |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |   | Kegiatan Kejadian Luar Biasa                     |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa:                         |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Honor tim                                      |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Konsumsi                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - Obat-obatan                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   | - dst.....                                       |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 2 |   | Kegiatan.....                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH BELANJA                                   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | <i>SURPLUS / DEFISIT</i>                         |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3 |   |   |   | PEMBIAYAAN                                       |  |  |  |  |
| 3 | 1 |   |   | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>                     |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |   | SILPA  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 |   | Pencairan Dana Cadangan                          |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 |   | Hasil Kekayaan Desa Yang di<br>pisahkan          |  |  |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH ( RP )                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |   |   | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>                    |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |   | Pembentukan Dana Cadangan                        |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 |   | Penyertaan Modal Desa                            |  |  |  |  |
|   |   |   |   | JUMLAH ( RP )                                    |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

| NO.          | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 1            | 2      | 3      | 4                  | 5            |
|              |        |        |                    |              |
|              |        |        |                    |              |
| JUMLAH (Rp.) |        |        |                    |              |

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APB Desa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

**BUPATI BULUNGAN,**

Ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001**